

Building Democracy in Latin America: United States Foreign Aid for Haiti

Membangun Demokrasi Di Amerika Latin: Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Untuk Haiti

Angelica Putri Arindrayani
Universitas Airlangga

ABSTRACT

This article provides an overview, implications, and challenges that arise at the intersection of international political, economic, social, and environmental dilemmas that intervened in Haiti's efforts to build the stability of its democracy during the pre-Cold War period until the post-2010 earthquake. This article applies an explanatory method analytically using aid failure theory to analyze the reasons behind the failure of USAID's democratization assistance in delivering democratic life in Haiti. The results show that trends in USAID democratization assistance to Haiti are volatile and unpredictable and thus do not support good governance. Lack of government accountability, lack of incentives to achieve results, and lack of involvement of the Haitian people in the implementation of elections, as well as a top-down approach that was less decentralized and less responsive to local needs also contributed to the failure of democratization assistance. If Haiti is to escape its permanent political instability, a more comprehensive policy-making paradigm shift is needed than just democratization assistance from USAID.

Keywords: *Democratization Assistance, Haiti, USAID, Democracy, Foreign Aid*

Artikel ini mengulas ikhtisar, implikasi, dan tantangan yang muncul di persimpangan dilema politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan internasional yang mengintervensi Haiti dalam upaya membangun stabilitas demokratisasinya selama periode sebelum Perang Dingin hingga periode pasca-gempa bumi tahun 2010. Artikel ini menerapkan metode eksplanatif secara analitis menggunakan aid failure theory untuk menganalisa alasan dibalik kegagalan bantuan demokratisasi USAID dalam menghantarkan kehidupan yang demokratis di Haiti. Hasil menunjukkan bahwa tren bantuan demokratisasi USAID untuk Haiti bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi sehingga tidak mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kurangnya akuntabilitas pemerintah, kurangnya insentif untuk mencapai hasil, dan kurangnya keterlibatan masyarakat Haiti dalam pelaksanaan pemilu, serta pendekatan top-down yang kurang terdesentralisasi dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal juga berkontribusi terhadap gagalnya bantuan demokratisasi. Jika Haiti ingin melepaskan diri dari ketidakstabilan politik permanennya, diperlukan pergeseran paradigma pembuat kebijakan yang lebih komprehensif daripada hanya sekedar bantuan demokratisasi dari USAID.

Kata-kata Kunci: *Bantuan Demokratisasi, Haiti, USAID, Demokrasi, Bantuan Luar Negeri*

*Building Democracy in Latin America:
United States Foreign Aid for Haiti*

Artikel ini bertujuan mengidentifikasi dampak bantuan demokratisasi yang disediakan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk Haiti, serta alasan dibalik belum berhasilnya USAID dalam menghantarkan kehidupan demokratis di negara tersebut. Pertama-tama, Haiti adalah salah satu negara Karibia yang terletak di pulau Hispaniola, di antara Laut Karibia dan Samudra Atlantik Utara. Selama bertahun-tahun, Haiti dikatakan sebagai negara paling tidak berkembang di Amerika Latin. Tidak berkembang baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Hal ini mencakup tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang relatif terbelakang, sistem partai yang kacau dan tidak kompetitif—oleh karena pemilu seringkali diwarnai oleh manipulasi suara, juga tingkat korupsi yang tidak terkendali, dan transparansi pemerintah yang sangat rendah (Klimovich dan Thomas 2014). Dengan pendapatan per kapita tahunan menyentuh angka \$300 AS (Castor 2019), Haiti tidak hanya dipandang sebagai negara termiskin di kawasan tersebut melainkan juga yang termiskin di belahan bumi barat (Klimovich dan Thomas 2014).

Secara umum, sejarah nasional Haiti termasuk yang paling tragis di dunia modern, dengan korupsi dan kondisi anarkis yang menyelimuti ciri pemerintahannya. Dalam lebih dari 200 tahun sejak mereka merdeka dari penjajahan Prancis pada 1804, sistem pemerintahan Haiti diwarnai oleh pemerintahan yang otoriter dan kediktatoran. Haiti juga memiliki sedikit pengalaman dengan demokrasi. Fauriol (2014) menggambarkan Haiti sebagai kleptokrasi, negara pemangsa, politik kemelaratan, dan bahkan negara yang gagal. Sebagai negara merdeka pertama di kawasan Amerika Latin dan Karibia (LAC), sistem politik negara Haiti termasuk yang paling korup di dunia—menempati posisi 165 dari daftar 180 negara—menurut Corruption Perception Index (CPI) tahun 2019, sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Pada tahun 2022, Haiti menempati urutan ke-171 dari 180 negara pada CPI, dengan skor korupsi dari Transparency International hanya 21 dalam skala dari 0 (“sangat korup”) hingga 100 (“sangat bersih”) (Transparency International n.d.). Tidak hanya itu, Haiti juga dikenal memiliki sistem yang paling korup di Amerika Latin.

Tabel 1
Komparasi Statistika Demografis 4 Negara Amerika Latin:
Costa Rica, Haiti, Paraguay, dan Uruguay

COSTA RICA, HAITI, PARAGUAY AND URUGUAY: NATIONAL STATISTICS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE												
Country	POPULATION AND DEMOGRAPHICS					SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL WORLD RANKINGS						
	Total population ^a	Percent employed in Agriculture ^c	Percent Rural ^b	Life expectancy, years, 2011 ^d	Percent literate, 2011 ^e	Gross domestic product—GDP per capita ^f	Human Development Index—HDI ^g	Gender Inequality Index—GII ^h	Corruption Perceptions Index—CPI ⁱ			
Chile	17,464,814	10 (2011)	11	79	99 (2009)	\$15,452	—47	0.819	—40	0.36	—66	20
Costa Rica	4,805,295	13	35	79	96	\$9,386	—71	0.773	—62	0.35	—62	48
Haiti	10,175,775	No data	45	62	No data	\$771	—165	0.456	—161	0.39	—127	168
Mexico	120,847,477	13 (2011)	22	77	94	\$9,749	—68	0.778	—61	0.38	—72	105
Paraguay	6,687,361	27	38	72	94 (2010)	\$3,813	—111	0.669	—111	0.47	—95	160
United Kingdom	63,227,526	1	20	80	99*	\$39,093	—27	0.875	—26	0.20	—42	17
United States	313,914,040	2 (2010)	17	79	99*	\$51,749	—14	0.767	—18	0.26	—42	19
Uruguay	3,395,253	11 (2011)	7	77	98	\$14,703	—49	0.792	—31	0.37	—69	20

Sumber: Klimovich dan Thomas (2014)

Laporan warga Haiti menunjukkan bahwa dua pertiga atau 67 persen dari mereka telah menjadi korban korupsi dari pemerintahan Haiti (Smith et al 2012). Tingkat korupsi ini bahkan jauh lebih tinggi daripada negara terkorup berikutnya di Amerika Serikat (AS). Belum lagi adanya peristiwa gempa bumi yang sangat menghancurkan Haiti. Menurut Smelse dan Lipset (2018), sejalan dengan Tabel 1, terdapat beberapa parameter yang menentukan maju atau tidaknya sebuah negara, yakni persentase masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, indeks persepsi korupsi, dan sebagainya. Tabel 1 selanjutnya memaparkan posisi Haiti yang kurang menunjukkan pembangunan ekonomi yang besar jika dibandingkan dengan negara Amerika Latin lainnya seperti Paraguay, Uruguay, dan Costa Rica.

Tidak hanya itu, laporan Democracy Matrix (2020) mengenai peringkat kualitas demokrasi suatu negara mencatat posisi Haiti yang berada di peringkat 131 dari 176 negara di seluruh dunia (semakin tinggi peringkatnya, semakin tidak demokratis suatu negara), dengan total indeks nilai sebesar 3,46 dalam skala dari 0 (“sangat otoriter”) hingga 10 (“sangat demokratis”), menjadikan Haiti sebagai negara dengan rezim otoriter. Kriteria indeks ini didasarkan pada 60 indikator yang telah dikelompokkan ke dalam lima kategori yang mengukur pluralisme, kebebasan sipil, dan budaya politik. Lebih dari itu, menurut data Freedom House (2017), Haiti dinilai memiliki status Partly Free, dari skala Free (“bebas”)-Partly Free (“sebagian terikat”)-hingga Not Free (“terikat”). Status ini merupakan kombinasi skor keseluruhan yang diberikan untuk bidang hak-hak politik dan kebebasan sipil suatu negara.

Banyak donor bantuan luar negeri yang mempromosikan tujuan utama pemerintahan demokratis ke dalam program bantuan mereka, termasuk AS. Melalui USAID, AS telah banyak terlibat dengan Amerika Latin dan Karibia sehubungan dengan bantuan

*Building Democracy in Latin America:
United States Foreign Aid for Haiti*

luar negeri. Bantuan demokratisasi kemudian merupakan sub-kategori bantuan luar negeri yang dirancang untuk meningkatkan fungsi lembaga, proses, dan partisipasi demokrasi—khususnya untuk negara dengan tingkat demokratisasi yang rapuh seperti Haiti (Azpuru 2008; Scott dan Carter 2015). Selain itu, bantuan demokratisasi seringkali berupa anggaran dana atau bantuan langsung kepada pemerintah, institusi, atau aktor masyarakat sipil guna memperkuat dan mendorong demokrasi di mana rezim non-demokrasi memegang kekuasaan.

USAID sendiri telah bertindak sebagai donor untuk Haiti sejak tahun 1973, dan merupakan donor terbesar untuk Haiti sejak 1975 (Pierre-Louis 2011). Pada tahun-tahun terakhir Perang Dingin, AS semakin gencar menjadikan promosi demokrasi sebagai tujuan kebijakan luar negerinya (Peterson dan Scott, 2017). Mengutip Knack (2004), USAID tercatat membelanjakan lebih dari US\$700 juta per tahun untuk program-program bantuan yang berkaitan dengan demokrasi. Tabel 2 lalu menunjukkan alokasi bantuan demokratisasi USAID untuk negara-negara Amerika Latin untuk tiga periode yang berbeda, diurutkan berdasarkan jumlah bantuan yang diberikan (Scott dan Carter 2015).

Tabel 2
Penerima utama bantuan demokratis AS di kawasan Amerika Latin dan Karibia pada tiga periode waktu yang berbeda (Dalam US\$)

Cold War		Post-Cold War		Post-9/11	
1975–88		1989–2000		2001–10	
El Salvador	315.7	Nicaragua	550.8	Mexico	\$1050.0
Costa Rica	52.9	Panama	462.0	Colombia	519.0
Ecuador	30.4	El Salvador	436.8	Haiti	416.0
Haiti	28.2	Haiti	289.2	Peru	165.0
Honduras	26.9	Colombia	187.2	Guatemala	133.0
Panama	25.5	Honduras	166.8	Cuba	129.0
Guatemala	20.5	Peru	126.0	El Salvador	121.0
		Guatemala	124.8	Nicaragua	108.0
		Bolivia	102.0	Paraguay	103.0
		Dom Rep	51.8	Bolivia	101.0
		Costa Rica	42.9	Dom Rep	87.2
		Ecuador	34.1	Ecuador	74.9
				Honduras	72.4
				Venezuela	57.4
				Jamaica	29.6
				Panama	26.3

Sumber: Scott dan Carter (2015)

Selanjutnya, Tabel 3 menyajikan bantuan demokrasi USAID ke Amerika Latin berdasarkan kategori negara, selama tahun 1990-2005 (Azpuru dan Shaw 2010). Tabel 2 dan 3 kemudian menunjukkan posisi Haiti yang konsisten menjadi resipien utama dari bantuan demokratis USAID, meski dalam 3 periode waktu

yang berbeda. Dengan demikian, mengingat ketidakstabilan politik yang dialami Haiti serta belum berhasilnya Haiti untuk keluar dari belenggu sistem demokratisasi yang buruk meski telah diberi bantuan oleh USAID, artikel ini lalu hendak mengkaji implikasi dari bantuan demokratisasi USAID terhadap *good governance* di Haiti, dengan pertanyaan penelitian mengapa bantuan demokratisasi AS untuk Haiti gagal dalam menghantarkan kehidupan yang demokratis di negara tersebut?

Tabel 3
Total Bantuan Demokrasi USAID ke Amerika Latin
Berdasarkan Kategori Negara Pada Tahun 1990-2005

Country	Total democracy assistance from USAID	
	Amount	% Of total provided to region
Haiti	281.00	16.43
El Salvador	190.26	11.12
Colombia	122.08	7.14
Nicaragua	108.72	6.36
Peru	108.23	6.33
Bolivia	90.59	5.30
Guatemala	82.76	4.84
Panama	78.38	4.58
Honduras	65.75	3.84
Ecuador	65.27	3.82
Mexico	63.32	3.70
Dominican Republic	60.41	3.53
Paraguay	41.74	2.44
Cuba	36.98	2.16
Guyana	19.95	1.17
Jamaica	11.95	0.70
Costa Rica	10.53	0.62
Brazil	7.15	0.42
Chile	4.49	0.26
Venezuela	1.52	0.09
Belize	1.48	0.08
Uruguay	1.21	0.07
Regional and subregional programs	256.73	15.0
Total	1710.5	100.0

Sumber: Azpuru dan Shaw (2010)

Aid Failure Theory

Teori *aid failure* sebagaimana dikemukakan oleh William Easterly (2003, 2006, 2009) menyoroti tantangan dan kegagalan yang terjadi dalam program bantuan pembangunan. Melalui bukunya "*The White Man's Burden*", Easterly (2006) menyampaikan sejumlah pandangan yang muncul dalam upaya efektivitas bantuan pembangunan yang disalurkan kepada negara-negara miskin. Menurutnya, bantuan sering kali tidak mencapai tujuan-tujuan pembangunan karena adanya masalah seperti kurangnya akuntabilitas, kurangnya insentif untuk mencapai hasil, dan kurangnya keterlibatan masyarakat resipien (Easterly 2009). Dalam konteks kurangnya keterlibatan masyarakat resipien,

yang dimaksud ialah respons atau inisiatif dari masyarakat pihak penerima bantuan, misalnya dalam pelaksanaan pemilu presiden. Selain itu, faktor lain yang mungkin menghambat tercapainya tujuan bantuan adalah ketidakstabilan aliran bantuan serta bantuan yang cenderung pasif terhadap kebutuhan lokal. Easterly mengkritik pendekatan pembangunan *top-down* yang melibatkan rencana besar dan terpusat, dan lebih mendukung solusi bantuan luar negeri yang lebih terdesentralisasi dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Easterly 2009). Hal ini misalnya berupa pendekatan *Market-Friendly*, yakni lebih terbuka terhadap pasar dan lebih memperhitungkan kebutuhan lokal daripada terpusat pada lembaga donor.

Sejalan dengan Easterly, Peter Bauer (1972) turut bertindak sebagai kritikus yang gigih terhadap keberadaan bantuan asing. Bantuan luar negeri didefinisikan sebagai “transfer sumber daya dari pembayar pajak suatu negara donor kepada pemerintah negara penerima” (Bauer 1975). Bauer memulai kritiknya ketika bantuan asing ke negara berkembang baru diluncurkan dan bersifat terus-menerus, yakni ketika dunia mengalami pertumbuhan demokrasi dan hak asasi manusia yang luar biasa. Menurut Bauer, bantuan luar negeri cenderung menciptakan insentif yang tidak diinginkan, salah satunya adalah meningkatkan ketergantungan negara resipien serta menghambat inisiatif lokal (Bauer 1975). Terbatasnya kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia suatu negara terbuang percuma untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dibandingkan kegiatan-kegiatan yang produktif. Bantuan menghancurkan insentif ekonomi, menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya yang langka, sehingga tidak hanya gagal untuk memulai, namun juga justru menghambat pertumbuhan (Shleifer 2009). Padahal, elemen penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ialah peran dari pasar bebas dan kewirausahaan lokal itu sendiri. Konsensus bahwa bantuan telah gagal hampir bersifat universal di antara mereka yang melihat data tersebut (Shleifer, 2009). Argumennya ialah, bantuan tidak hanya gagal mempercepat pembangunan ekonomi, namun juga merugikan pembangunan (Shleifer 2009). Pernyataan ini didukung oleh beragam studi empiris yang kerap kali gagal menemukan dampak menguntungkan dari Bantuan Luar Negeri Resmi (ODA). Pada sisi lain, Easterly (2006) membahas argumen-argumen ini secara rinci dan memberikan banyak bukti yang mendukung skeptisisme Bauer mengenai dorongan besar tersebut.

Easterly (2009) mengadakan survei mengenai berbagai alasan buruknya kinerja bantuan luar negeri, namun gagasan dasarnya kembali ke Bauer. Salah satu pendekatan lainnya adalah dengan mengikuti jalan panjang dan rumit yang harus dilalui oleh pembayar pajak di negara-negara Barat sebelum dana tersebut sampai ke penerima yang membutuhkan di negara berkembang. Sekalipun dana bantuan tersebut sampai ke negara bilateral dengan tujuan dibelanjakan untuk pembangunan sebenarnya, selain memiliki staf dalam jumlah besar, lembaga-lembaga ini sering kali mempunyai ide sendiri, serta kendala dalam membelanjakan dana yang ditentukan oleh prioritas donor (Shleifer 2009). Selain itu, lembaga-lembaga pembangunan mempunyai insentif yang kuat untuk melakukan pembelanjaan – mengeluarkan dana (inilah dorongan yang sangat besar). Artinya, negara-negara penerima akan menerima dana tersebut sebagai hibah, dan bersedia membelanjakannya untuk proyek-proyek terbesar. Dengan demikian, mereka menjadi kandidat yang paling menarik untuk menerima bantuan. Namun hanya ada sedikit bukti bahwa bantuan tersebut dialokasikan ke negara-negara yang membelanjakannya dengan lebih bijaksana (Easterly 2006).

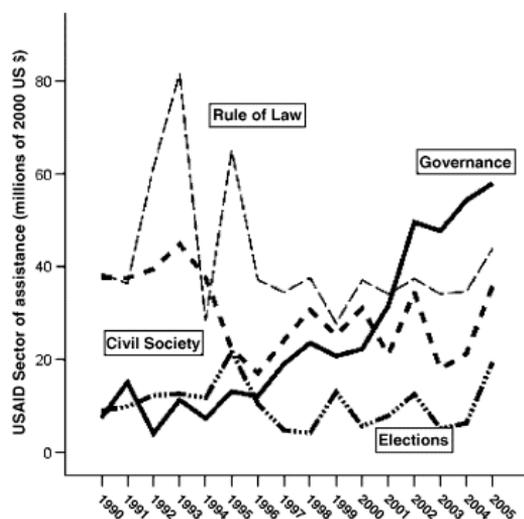
Dalam hal ini, sejalan dengan gagasan Easterly dan Bauer, penulis mengangkat argumen bahwa bantuan demokratisasi USAID dikatakan gagal mencapai tujuannya oleh karena sejumlah alasan. Fluktuatifnya tren bantuan demokratisasi USAID untuk Haiti menghasilkan pola dan alokasi sektor bantuan yang tidak dapat diprediksi. Adapun kurangnya akuntabilitas pemerintah, kurangnya insentif untuk mencapai hasil, dan kurangnya keterlibatan masyarakat Haiti dalam pelaksanaan pemilu merupakan poin yang berbeda. Bersamaan dengan itu, pendekatan *top-down* yang kurang terdesentralisasi dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal juga berkontribusi terhadap gagalnya bantuan demokratisasi. Jika Haiti ingin melepaskan diri dari ketidakstabilan politik permanennya, diperlukan pergeseran paradigma pembuat kebijakan yang lebih komprehensif daripada hanya sekedar bantuan demokratisasi dari USAID.

Klasifikasi Bantuan Demokratis USAID Menurut Sektor

Pada dasarnya, bantuan demokratisasi merupakan salah satu bentuk bantuan luar negeri yang bertujuan mendorong fungsi dan efektivitas dari lembaga, proses, dan partisipasi demokrasi di

negara resipien (Scott dan Carter 2015). Dalam hal ini, kategori bantuan demokratisasi yang disediakan USAID terbagi menjadi empat sektor: (1) Penegakan hukum (*Rule of Law*); (2) masyarakat sipil; (3) pemilu yang kompetitif dan proses politik; dan (4) tata kelola yang dapat dipercaya (Azpuru dan Shaw 2010). Gambar 1 menunjukkan bahwa bantuan pemilu belum menjadi sektor utama yang mendapat manfaat dari bantuan demokratisasi USAID untuk Amerika Latin pada kurun waktu 1990-2005. Jumlah terbesar diarahkan untuk penguatan *Rule of Law* (mewakili hampir 39,2 persen dari total), diikuti oleh dukungan untuk masyarakat sipil (27,9 persen) dan program tata kelola yang meningkat secara konstan dari tahun ke tahun (23,2 persen) (Azpuru dan Shaw 2010).

Gambar 1
Klasifikasi Sektor Bantuan USAID untuk Amerika Latin dan Karibia (1990-2005)



Sumber: Apzuru dan Shaw (2010)

Mengutip Azpuru dan Shaw (2010), sektor penegakan hukum mencakup alokasi dana untuk reformasi hukum, meningkatkan administrasi peradilan, legislatif, partisipasi serta akses warga negara terhadap keadilan sistem hukum. Sektor masyarakat sipil mencakup alokasi dana untuk mendukung kelompok non-pemerintah seperti kinerja kelompok sipil, organisasi pemantau hak asasi manusia, kelompok pendidikan kewarganegaraan, kelompok media, federasi bisnis dan buruh, dan lain-lain

sehubungan dengan kemajuan demokratisasi. Pemilu sendiri meliputi sejumlah program yang mendukung pelaksanaan pemilu, promosi pemungutan suara, dukungan teknis, kinerja partai politik, pemantauan jalannya keadilan sistem pemilu, dan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat (Von Hippel 1995). Kemudian, sektor tata kelola atau pemerintahan berkaitan erat dengan sejumlah isu yang bertugas memastikan berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi secara efektif, yakni kegiatan anti-korupsi, desentralisasi, penguatan pemerintah daerah, implementasi kebijakan nasional maupun daerah yang efektif, dan peningkatan hubungan sipil dan militer.

Mengacu pada Gambar 1, meskipun *Rule of Law* telah menjadi sektor yang paling banyak menerima bantuan demokrasi dari waktu ke waktu, pada tahun 2002, pendanaan untuk sektor tata kelola telah melampaui lebih dari 50 persen total bantuan untuk sektor *Rule of Law* tersebut. Dari sini, meskipun jumlah dana bantuan bervariasi selama bertahun-tahun dan beberapa negara telah menerima jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang lain, tingkat keseluruhan bantuan demokratisasi tetap relatif konstan (Azpuru dan Shaw 2010). Sementara itu, dalam sektor pemilu, Organisasi Pemantau Pemilu Domestik (DMO) menjadi pemain kunci dalam memantau dan melaporkan hasil pemilu (Lean 2007). DMO mendefinisikan diri mereka dalam kaitannya dengan potensi demokratisasi masyarakat sipil, yang mana keberadaannya berhubungan langsung dengan donor luar negeri serta bantuan teknis yang membantu program mereka. Salah satu DMO di Haiti yang menerima lebih dari \$400.000 AS dari USAID pada tahun 2001 adalah Conseil National d'Observation (CNO), yang mana dana tersebut digunakan untuk kegiatan pemantauan pemilu dan reformasi kebijakan pemerintah Haiti (USAID 2002).

Bahkan ketika tidak dikategorikan sebagai bantuan demokratis pun, bantuan USAID secara tidak langsung tetap mempromosikan demokrasi, yakni dengan “memodernisasi” masyarakat (Knack 2004). Modernisasi ini dilakukan dengan meningkatkan literasi masyarakat, sehingga mereka sadar akan keinginan untuk mendorong bentuk pemerintahan yang demokratis. Semakin banyak bantuan asing, maka semakin meningkat juga pertumbuhan ekonomi suatu negara, sebagaimana banyak program bantuan ditujukan untuk mendorong tingkat melek huruf, akses ke pendidikan, dan pendapatan per kapita (Lipset 1959). Kemudian, melihat satu dekade upaya USAID dalam membantu mempromosikan pemerintahan yang demokratis di

Haiti, dengan sejumlah sektor bantuan demokratisasi yang unggul, lantas mengapa Haiti masih dianggap berada pada kondisi yang serupa dengan kondisi awal—yakni tidak mampu menanggulangi krisis politik?

Dinamika Kepemimpinan Aristide dan Promosi Demokrasi AS di Haiti

Di Haiti, promosi demokrasi AS dikatakan merana dari awal hingga pertengahan 1990-an. Hal ini disebabkan oleh krisis politik yang melibatkan kudeta militer Haiti terhadap Jean Bertrand Aristide (yang lalu disusul oleh intervensi AS); baru setelah itu bantuan demokratisasi AS meningkat tajam. Aristide adalah presiden pertama Haiti yang terpilih secara demokratis pada tahun 1990. Kepemimpinannya dianggap cukup kontroversial dalam kaitannya dengan jatuh bangun sistem demokratisasi di Haiti. Aristide memenangkan pemilu tahun 1990 dengan mendapat dukungan mayoritas dari rakyat Haiti, khususnya dari kalangan masyarakat miskin. Kemenangan Aristide sebagai presiden disorot secara utama karena menandai pemilu demokratis pertama di Haiti serta sebagai tonggak penting dalam proses demokratisasi Haiti.

Meski begitu, kurang dari satu tahun sejak dilantik sebagai presiden, Aristide digulingkan pada 29 September 1991 oleh karena kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Raoul Cedras. Ia sempat diasingkan dari Haiti dan melarikan diri ke AS. Setelah penggulingan pertamanya, Ia berhasil kembali ke Haiti pada tahun 1994 setelah periode intervensi militer AS “Operasi Restore Democracy” yang dipimpin oleh presiden Bill Clinton. Aristide kembali memulihkan jabatan presiden keduanya pada pemilu tahun 1994 oleh karena dukungan komunitas internasional, termasuk AS yang mendesak untuk mengembalikan Aristide ke jabatan presidennya.

Selanjutnya, pada tahun 2004, Aristide sekali lagi dihadapkan pada penggulingan kekuasaan akibat kekacauan politik dan protes massal, serta pemberontakan bersenjata dan tekanan internasional, yang memaksanya mengundurkan diri sebagai presiden Haiti. Aristide sendiri merupakan anggota partai politik Fanmi Lavalas, yaitu partai politik sosial-demokratis yang telah berkuasa secara kuat di Haiti sejak tahun 1991 (Klimovich dan Thomas 2014). Aristide mulai memimpin partai ini pada 1996.

Sebelumnya, Fanmi Lavalas dikenal dengan sebutan Organisasi Politik Lavalas (OPL), yang lalu pecah menjadi dua kubu pada 1996, yang mana Fanmi Lavalas merupakan kubu gerakan politik Lavalas yang pro-Aristide. Lavalas sendiri adalah gerakan populer yang mendorong reformasi sosial dan mendukung kelompok masyarakat Haiti yang dianggap tersingkirkan. Dengan demikian, dinamika yang kompleks dan penuh gejolak dari sistem demokrasi di Haiti, sejatinya berakar dari sejumlah faktor seperti ketegangan politik, intervensi asing, ketimpangan ekonomi, dan konflik internal. Semuanya ini berperan dalam pemulihan sekaligus penggulingan Aristide sebagai presiden Haiti. Perjalanan politik Aristide mencerminkan tantangan dan kompleksitas proses demokrasi di Haiti sebagai negara yang dilanda keras krisis politik dan sosial, serta merefleksikan tantangan untuk membangun dan mempertahankan sistem demokrasi Haiti yang stabil dan inklusif.

Tren Bantuan Demokratisasi USAID

Secara umum, tren bantuan demokratisasi USAID untuk Haiti bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Tabel 2 di atas menyajikan tren bantuan luar negeri AS ke wilayah Amerika Latin setelah Perang Dunia II (1975-1989) yang berlangsung dalam tiga periode lonjakan: (1) bantuan demokrasi relatif rendah pada 1980-an, sebelum melonjak pada akhir Perang Dingin; (2) bantuan menurun pada pertengahan 1990-an; dan (3) cakupan bantuan menjadi lebih luas pasca-9/11, yang mana Amerika Latin menerima bantuan USAID tertinggi mencapai \$157 AS di bawah kepemimpinan George W. Bush (Azpuru dan Shaw 2010; Scott dan Carter 2016). Dalam pola bantuan luar negeri secara keseluruhan ini, peningkatan bantuan demokratisasi patut diperhatikan. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang menyebabkan fluktuatifnya bantuan demokratisasi AS ke Amerika Latin dan Karibia?

Mengutip Gustavsson (1999) dan Checkel (1997), kondisi krisis yang terjadi dalam sebuah negara merupakan faktor penting yang memicu ketidakstabilan politik, yang akhirnya mengarah pada perubahan kebijakan. Gagasan utamanya adalah bahwa kebijakan, termasuk dalam memberikan bantuan luar negeri, cenderung dicirikan oleh periode stabilitas (Baumgartner dan Jones 2010). Menurut Diehl dan Goertz (2001), sistem politik internasional (termasuk dinamika geopolitik dan ideologi perang dunia) menjadi bentuk pemicu internasional yang menyebabkan pergeseran dalam kebijakan luar negeri, sehingga dapat mengubah

*Building Democracy in Latin America:
United States Foreign Aid for Haiti*

peluang atau malah menyebabkan masalah (misalnya perubahan rezim di negara tertentu atau perubahan kebijakan di tingkat negara dan masyarakat). Oleh karena itu, perubahan dan peristiwa di lingkungan internasional yang menentukan alokasi bantuan demokratisasi AS ke Haiti. Dinamika politik dalam negara serta berbagai peristiwa internasional merupakan penyebab perubahan dalam hubungan antar negara, termasuk dalam menghasilkan pergeseran keputusan kebijakan AS dalam memberikan bantuan demokratis ke Haiti (Diehl dan Goertz 2001).

Sepanjang Perang Dingin (1975-1989), alokasi bantuan demokratisasi AS di Amerika Latin dicirikan relatif rendah, sebagian karena bantuan luar negeri AS merefleksikan kekhawatiran terkait kontes ideologis antara AS dan Uni Soviet. Bantuan seringkali dikaitkan dengan dukungan politik terhadap rezim yang dianggap pro-Amerika, dan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi politik di wilayah tersebut. Ketidakstabilan politik dan jatuh banggunya pemerintahan serta kondisi anarkis dan otoriter juga memainkan peran dalam fluktuasi bantuan. Meskipun demikian, beberapa proyek USAID kadang-kadang diarahkan untuk mempromosikan demokrasi di kawasan tersebut. Hal ini misalnya berupa upaya militerisasi pada perubahan rezim—baik secara langsung atau pun tidak—yang seringkali didorong oleh kepentingan Realpolitik, atau dukungan yang lebih umum untuk rezim anti-komunis (Scott dan Carter 2016).

Selanjutnya, konteks pasca-Perang Dingin (1990-2001) mendorong minat yang jauh lebih besar dalam bantuan demokratisasi AS untuk semakin mempromosikan demokrasi di kawasan (Scott dan Steele 2011; Doyle 1986). Hal ini sebagian didorong oleh mundurnya rezim otoriter di Amerika Latin, serta Perang Vietnam yang menghasilkan pergeseran prioritas kebijakan luar negeri AS yang lebih besar pada jenis rezim yang didukungnya (Fleck dan Kilby 2010; Lai 2003; Lancaster 2008). Menanggapi perubahan tantangan dan peluang internasional ini, Bill Clinton dan George W. Bush sebagai dua presiden AS pasca-Perang Dingin kemudian memperjuangkan dan menetapkan bantuan demokratisasi sebagai program dalam USAID, termasuk kepada kawasan Amerika Latin. Bersama dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, Haiti juga menjadi target utama kebijakan AS yang berorientasi komersial, termasuk dalam hal bantuan ekonomi. Intervensi AS di Haiti pada tahun 1994 juga menghasilkan komitmen signifikan AS dalam mempromosikan demokrasi serta membangun dan mempertahankan rezim yang lebih demokratis di Haiti (Scott

dan Carter 2016). Selama tahun 1992-2002, lebih dari \$1 miliar diinvestasikan USAID dalam program bantuan demokrasi di Amerika Latin (US GAO 2003).

Baru setelah serangan teror 9/11, prioritas bantuan demokratisasi AS untuk wilayah Amerika Latin menjadi lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain seperti Timur Tengah dan Asia Selatan (Scott dan Carter 2015). Ini disebabkan oleh munculnya kekhawatiran dari perumus kebijakan AS pasca-9/11 bahwa teroris akan menggunakan Amerika Latin sebagai basis baru untuk menyelip ke AS. Terkadang, AS dapat memberikan dukungan kepada rezim otoriter demi kepentingan strategis yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi atau *good governance*. Lebih jauh, berbagai program bantuan demokratis yang disediakan USAID dikenal dengan istilah bantuan Pemerintahan Demokratis (DG). Dari sini, fluktuatifnya bantuan demokratisasi tidak selalu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Haiti.

Partisipasi Politik, Akuntabilitas, dan Bentuk Pendekatan dalam Memberi Bantuan

Beberapa dampak bantuan demokratisasi yang diberikan oleh USAID untuk mendukung pertumbuhan demokratisasi dan *good governance* di Haiti menyoroti sejumlah dampak positif dalam tujuannya untuk memperkuat kapasitas institusi pemerintah dan non-pemerintah di Haiti. Dalam hal ini, pembangunan institusi diharapkan dapat mempromosikan demokrasi, restrukturisasi pemerintah, dan keberhasilan transisi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiganya ini merupakan kunci untuk menekan ketidakstabilan politik di Haiti—termasuk korupsi. Sebab, sistem hukum dan peradilan membutuhkan reformasi yang signifikan jika demokrasi ingin bertahan. Hal ini dilakukan misalnya melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya teknis untuk memperbaiki sistem pemerintahan, hukum, dan administrasi publik. Kendati demikian, sebagaimana disebutkan di atas, bantuan demokratisasi USAID untuk Haiti bersifat fluktuatif dan tidak stabil sehingga tidak mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Burnside dan Dollar 2000). Hal ini berpotensi menghambat pengeluaran pemerintah yang koheren atau pengembangan akuntabilitas lembaga-lembaga yang sehat di Haiti (Burnside dan Dollar 2000). Jalan panjang dan rumit serta perbedaan insentif dari USAID dan Haiti dapat menjadi kendala baru dalam membelanjakan dana yang diprioritaskan oleh USAID (Shleifer 2009).

Kemudian, bantuan demokratisasi USAID seharusnya menyoroti adanya peningkatan partisipasi politik. Hal ini misalnya berupa penguatan partisipasi politik masyarakat Haiti, termasuk pendidikan terkait pemilihan umum, pelatihan politik, dan dukungan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka. Namun, banyak penelitian sebelumnya membuktikan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2015 yang sangat rendah yakni hanya 21 persen. Pemilu tersebut berlangsung penuh dengan kekacauan, kecurangan, dan kekerasan. Kendala logistik, daftar pemilih yang tidak konsisten, dan tidak dapat diaksesnya tempat pemungutan suara, terutama di daerah yang terkena banjir dan badai, menghalangi sebagian orang untuk memilih.

Lebih lanjut, implikasi lainnya adalah bahwa bantuan bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang tidak hanya terbatas pada pemerintahan dan lembaga publik. Ini dilakukan melalui peningkatan akses informasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan dengan mempromosikan prinsip *good governance*. Dalam konteks bantuan demokratisasi USAID untuk Haiti, beberapa aspek teori kegagalan bantuan dapat diidentifikasi. Misalnya, kurangnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam penggunaan dana bantuan. Dalam kaitannya dengan perspektif Easterly (2009), jika bantuan demokratisasi USAID untuk Haiti cenderung mengadopsi pendekatan *top-down* dan kurang memperhitungkan dinamika lokal, ini dapat menghadirkan risiko inefisiensi bantuan terhadap pembangunan, yang kemudian berkaitan dengan perspektif Bauer, yakni sejauh mana bantuan USAID dapat mempertimbangkan inisiatif lokal, atau bahkan memperkuatnya; serta apakah bantuan USAID menghasilkan ketergantungan yang tidak diinginkan dari pihak Haiti.

Pendekatan *top-down* seringkali melibatkan perencanaan dan implementasi program secara hierarkis, dengan kurang memperhatikan pandangan dan kebutuhan lokal. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara inisiatif demokratisasi yang diimpor dan dinamika sosial, politik, dan budaya di tingkat lokal. USAID mungkin gagal memahami secara mendalam konteks Haiti, sehingga implementasi bantuan menjadi kurang efektif. Pendekatan bantuan *top-down* yang kurang terdesentralisasi ini dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi dan kepemilikan lokal. Bantuan yang diarahkan dari pusat seringkali tidak memperhitungkan keberagaman dan kompleksitas tingkat

lokal, menghambat kemampuan komunitas untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan dengan efektif. Ketiadaan respons terhadap kebutuhan lokal dapat terjadi jika desain program tidak memperhitungkan dinamika yang berubah atau jika tidak ada mekanisme umpan balik yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan situasional. Ini dapat menyebabkan ketidakmampuan bantuan untuk secara efektif mempromosikan demokrasi yang relevan dan berkelanjutan di Haiti. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan *top-down* yang kurang terdesentralisasi dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal dapat menjadi faktor kontributor terhadap kegagalan bantuan demokratisasi USAID di Haiti.

Padahal, Haiti merupakan negara merdeka pertama di kawasan Amerika Latin, namun saat ini adalah negara yang paling bergantung pada pihak lain. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat Haiti dalam perencanaan dan pelaksanaan program demokratisasi, termasuk pemilu presiden, juga dapat membatasi keberhasilan upaya tersebut. Fakta bahwa keterlibatan penuh masyarakat merupakan elemen kunci yang seringkali terabaikan dalam implementasi program bantuan demokratisasi, termasuk dalam proses pemilu. Lebih jauh, perubahan politik yang sering kali terjadi di Haiti dan tantangan institusional dapat menjadi faktor lain yang berkontribusi terhadap kesulitan dalam mencapai hasil yang diinginkan dari bantuan demokratisasi.

Tidak berhenti di situ, dalam konteks sektor pemilu, bantuan demokratisasi USAID juga dapat dinilai melalui sukses atau tidaknya DMO dalam memantau jalannya pemilu. Adapun parameter kesuksesan DMO adalah, pertama, apakah mereka memberi masyarakat sipil kesempatan untuk berpartisipasi serta memberi pengetahuan seputar keterampilan kewarganegaraan. DMO yang berhasil dalam hal ini berkontribusi secara signifikan untuk memobilisasi sukarelawan dan menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu (Lean 2007). Selain itu, apakah ada transparansi, akuntabilitas, penyampaian tujuan pluralistis di antara organisasi masyarakat sipil dalam memodelkan demokrasi (Scott dan Steele 2005). Dan DMO yang berhasil cenderung mendapatkan pengakuan dari otoritas politik dan warga negara sebagai perantara antara negara, masyarakat, bahkan komunitas internasional dalam mendukung keberlangsungan demokrasi (Lean 2007).

Hubungan Bilateral AS-Haiti

Terkait kedudukan AS di Haiti sebelumnya, secara teknis, AS tidak secara langsung “menduduki” atau menguasai dan menginvasi Haiti. Namun, Haiti sendiri memiliki sejarah panjang intervensi dari pihak asing, termasuk dari AS. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan di balik intervensi AS di Haiti. Pertama, kepentingan strategis Amerika Serikat. Secara geografis, Haiti terletak di dekat pantai timur AS dan Selat Kepulauan Karibia, sehingga stabilitas politik dan keamanan di Haiti dapat berdampak pada stabilitas di kawasan pantai timur AS serta Kepulauan Karibia. Oleh karena itu, AS memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas di Haiti. Kedua, dalam hal perdagangan dan ekonomi, Haiti merupakan pasar potensial penting bagi komoditas produk AS dan Haiti adalah salah satu mitra dagang utama AS di Karibia. AS memiliki kepentingan dalam memperluas akses pasar dan mempromosikan hubungan ekonominya dengan Haiti, terutama dalam hal mengimpor gula, tembakau, dan kopi (Mintz 1995). AS juga mengincar perluasan pabrik manufaktur dan perakitan *apparel* di negara tersebut.

Ketiga, adanya alasan kemanusiaan. Krisis kemanusiaan dan bencana alam sering terjadi di Haiti, seperti gempa bumi yang menghancurkan pada tahun 2010. AS kemudian telah terlibat aktif dalam upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan pasca-bencana di Haiti. Hal ini berhubungan erat dengan poin selanjutnya, yaitu keempatan, migrasi. Kondisi ekonomi dan politik yang sulit di Haiti telah menyebabkan migrasi besar-besaran penduduk Haiti ke AS. AS telah terlibat dalam pengelolaan dan penanganan masalah imigran dari Haiti. Dalam beberapa kasus, intervensi dan campur tangan AS di Haiti terjadi secara kontroversial dan sering diperdebatkan. Beberapa kritikus menuduh AS melakukan campur tangan yang berlebihan dan tidak menghormati kedaulatan Haiti. Namun, ada juga argumen bahwa intervensi tersebut dilakukan dengan alasan kemanusiaan guna mempromosikan stabilitas, pembangunan, dan demokrasi di Haiti.

Keberadaan Elit Mulatto dan Gempa Bumi Haiti

Secara demografis, populasi Haiti dinilai cukup homogen secara ras dan etnis. Pembangunan politik-ekonomi Haiti terletak pada masyarakatnya yang terfragmentasi (baik secara ekonomi, sosial, dan politik) serta kontribusi eksploitasi massal penduduk oleh para elit (Kimovich dan Thomas 2014). Elit tersebut ialah elit kulit

hitam yang mendominasi ibu kota dan memegang jabatan tertinggi di pemerintahan, serta elit *mulatto* yang menjalankan banyak bisnis. Keduanya memanfaatkan pertanian untuk menghasilkan pendapatan dengan memungut pajak kepada kaum tani dan mengontrol penuh kontrol kegiatan administrasi (DeWind 2019).

Dalam banyak hal, ibu kota Port-au-Prince dan seluruh Haiti adalah dua dunia yang berbeda (Klimovich dan Thomas 2014). Masyarakat pedesaan yang masih sangat bergantung pada pertanian secara kuat masih berdomisili di Haiti, sedangkan elit menguasai perkotaan Port-au-Prince secara signifikan. Elit bisnis *mulatto* dan elit hitam secara utama berkolusi dalam korupsi yang sangat luas, menghasilkan tantangan ketidakstabilan politik yang tak kunjung usai. Dengan demikian, selain mengalami eksploitasi oleh para elit, petani dan kaum miskin pedesaan Haiti juga dianggap tidak memiliki hak dan peran dalam proses kebijakan publik.

Ketika gempa bumi 7,0 Skala Richter (SR) menghancurkan Haiti pada tahun 2010, lebih dari 300.000 penduduk meninggal dunia, 1,5 juta kehilangan tempat tinggal, dan puluhan ribu melarikan diri (Charles 2021; Yates 2021). Belum lagi adanya gempa 7,2 SR di Haiti pada 2021—serta pembunuhan Presiden Jovenel Moïse di tahun yang sama—yang semakin memperburuk jumlah migran yang melarikan diri ke AS (Yates 2021). Pada tahun 2021, lebih dari 128.000 orang tercatat bermigrasi ke perbatasan AS-Meksiko, dan hampir 80.000 warga Haiti tetap terlantar dalam perjuangan mereka untuk membangun kembali masa depan mereka yang tidak jelas (IOM 2015; Charles 2021); namun peristiwa tragis ini adalah kasus lain yang berbeda. Menanggapi gempa tahun 2010 tersebut, USAID sendiri telah membelanjakan lebih dari dua miliar dolar untuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan jangka panjang di Haiti (Johnston dan Lorentzen 2022).

Pasca-gempa tahun 2010, situasi di Haiti terus menjadi sebuah ketidakpastian dan ketidakstabilan politik masih mengganggu setiap aspek kehidupan masyarakatnya terlepas dari investasi demokratisasi besar AS selama bertahun-tahun. Efektivitas bantuan luar negeri dalam mempromosikan demokrasi kemudian bergantung pada berbagai faktor, termasuk komitmen atau keseriusan pemerintah Haiti untuk melakukan reformasi, keberlanjutan program bantuan, dan koordinasi yang baik antara pemerintah donor dan pihak penerima. Penting bagi pihak donor bantuan luar negeri untuk mengakomodasi kebutuhan dan

tantangan yang spesifik yang dihadapi Haiti, serta melibatkan partisipasi aktif kelompok masyarakat sipil dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program bantuan. Secara keseluruhan, bantuan demokratisasi yang disediakan oleh USAID berkontribusi dalam memperkuat sistem politik Haiti, mendukung pemilihan yang bebas dan adil, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, membangun kapasitas pemerintah, dan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Namun perubahan dalam sistem demokratisasi dan *good governance* yang signifikan di Haiti memerlukan upaya jangka panjang secara berkelanjutan yang melebihi sekedar bantuan asing, dan juga membutuhkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan di Haiti.

Simpulan

Sejak akhir Perang Dingin, Amerika Serikat telah gencar mempromosikan demokrasi di Amerika Latin, dengan Haiti sebagai negara penerima bantuan demokratisasi terbesar dari USAID. Bantuan demokratisasi yang ditawarkan USAID kepada Haiti berdiri sebagai upaya untuk mendukung pembangunan institusi demokrasi, penguatan *good governance*, dan peningkatan partisipasi politik di negara tersebut. Namun, di Amerika Latin, bantuan AS belum tentu menjamin perubahan sistem demokratisasi yang kuat. Memang benar bahwa selama tahun-tahun USAID telah menyediakan bantuan demokratisasi, namun hal ini secara keseluruhan lebih mengutamakan pembangunan kelembagaan, bukan pembangunan budaya demokrasi atau pun penciptaan mekanisme partisipasi demokrasi dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan Easterly dan Bauer mungkin benar mengenai bantuan luar negeri, bahwa bantuan luar negeri telah gagal mencapai tujuan utamanya: memacu pertumbuhan ekonomi. Alasan kegagalannya mungkin beragam dan lebih kompleks—dibandingkan sekedar model pembangunan yang gagal. Namun bukti-bukti yang ada, salah satunya dari kasus Haiti telah secara luas menguatkan pandangan Easterly dan Bauer.

Secara keseluruhan, demokrasi di Haiti adalah suatu perjuangan yang memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Bantuan luar negeri dalam hal ini memainkan peran penting dalam mempromosikan demokratisasi, namun upaya secara menyeluruh memerlukan

komitmen politik yang kuat dari pemerintah, penegakan hukum yang efektif, penghapusan korupsi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi Haiti dalam mengukuhkan demokratisasinya masih terpampang nyata. Bahkan meskipun bantuan demokratisasi telah berkontribusi positif, namun perubahan dalam sistem demokratisasi dan *good governance* yang signifikan memerlukan upaya jangka panjang, termasuk reformasi struktural dan perubahan dalam budaya politik untuk terlebih dahulu memulihkan ketidakstabilan politik di Haiti. Oleh karena itu, sementara bantuan demokratisasi dapat memberikan dorongan awal, perubahan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan di Haiti, serta dukungan yang berkelanjutan dari masyarakat internasional.

Tentang Penulis

Angelica Putri Arindrayani adalah mahasiswa Magister Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Sosial di Universitas Bina Nusantara pada 2021, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Airlangga. Penulis dapat dihubungi melalui email di angelica.putri.arin-2022@fisip.unair.ac.id.

Referensi

Buku dan Bab dalam Buku

- Baumgartner, Frank R., and Bryan D. Jones, 2010. *Agendas and instability in American politics*. University of Chicago Press.
- Checkel, Jeffrey T., 1997. *Ideas and international political change: Soviet/Russian behavior and the end of the Cold War*. Yale University Press.
- DeWind, Josh, 2019. *Aiding migration: The impact of international development assistance on Haiti*. Routledge.
- Diehl, Paul, and Gary Goertz, 2001. *War and peace in international rivalry*. University of Michigan Press.

*Building Democracy in Latin America:
United States Foreign Aid for Haiti*

- Easterly, William, 2006. *The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good*. New York: Penguin Press.
- Fauriol GA., 2014. "Haiti: conflict and the search for democratic governance", In Wiarda HJ., and Kline HF (eds.), *Latin American Politics and Development*, Westview Press: Boulder.
- Kapiszewski D (ed.). 2002. "Encyclopedia of Latin American Politics. Center for Latin American Studies", Georgetown University. Oryx Press: Westport, Haiti.
- Lancaster, Carol, 2008. *Foreign aid: Diplomacy, development, domestic politics*. University of Chicago Press.
- Mintz, Sidney W., 1995. "Can Haiti Change?" *Foreign Affairs*.
- Smelser, Neil J., and Seymour Martin Lipset, 2018. "Social structure, mobility and development." *Social Structure & Mobility in Economic Development*. Routledge.
- Smith, Amy Erica, et al., 2012. "The political culture of democracy in Haiti and in the Americas: Towards equality of opportunity." *Nashville: Latin American Public Opinion Project*.

Jurnal dan Artikel Jurnal

- Azpuru, Dinorah, and Carolyn M. Shaw, 2010. "The United States and the promotion of democracy in Latin America: then, now and tomorrow", *Orbis*, **54**(2): 252-267.
- Bauer, Peter T., 1975, "N. H. Stern on Substance and Method in Development Economics," *Journal of Development Economics*, 2: 387-405.
- Burnside, Craig, and Dollar, David, 2000. "Aid, policies, and growth", *American economic review*, **90**(4): 847-868.
- Castor, Suzy, 2019. "Democracy and society in Haiti: structures of domination and resistance to change", *Latin America Faces the Twenty-First Century*, 158-169.

- Doyle, Michael W., 1986. "Liberalism and world politics", *American political science review*, **80**(4): 1151-1169.
- Easterly, William, 2003, "Can Foreign Aid Buy Growth?" *Journal of Economic Perspectives*, 17: 23-48.
- Easterly, William, 2009. "Can the West Save Africa?" *Journal of Economic Literature*, 47: 373-447.
- Fleck, Robert K., and Christopher Kilby, 2010. "Changing aid regimes? US foreign aid from the Cold War to the War on Terror", *Journal of Development Economics*, **91**(2): 185-197.
- Gustavsson, Jakob, 1999. "How should we study foreign policy change?", *Cooperation and Conflict*, **34**(1): 73-95.
- Johnston, Jake, and Annee Lorentzen, 2022. "Capacity development for whom? An Agenda for USAID reform in Haiti."
- Klimovich, Kristina, and Clive S. Thomas, 2014. "Power groups, interests and interest groups in consolidated and transitional democracies: Comparing Uruguay and Costa Rica with Paraguay and Haiti", *Journal of Public Affairs*, **14**(3-4): 183-211.
- Knack, Stephen, 2004. Does foreign aid promote democracy? *International studies quarterly*, **48**(1), 251-266.
- Lai, Brian, 2003. "Examining the goals of US foreign assistance in the post-cold war period, 1991-96", *Journal of Peace Research*, **40**(1): 103-128.
- Lean, Sharon F., 2007. "Democracy assistance to domestic election monitoring organizations: Conditions for success", *Democratisation*, **14**(2): 289-312.
- Lipset, Seymour Martin, 1959. "Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy", *American political science review*, **53**(1): 69-105.
- Pierre-Louis, Francois, 2011. "Earthquakes, nongovernmental organizations, and governance in Haiti", *Journal of Black*

*Building Democracy in Latin America:
United States Foreign Aid for Haiti*

Studies, **42**(2): 186-202.

Scott, James M., and Carie A. Steele, 2005. "Assisting democrats or resisting dictators? The nature and impact of democracy support by the United States National Endowment for Democracy, 1990–99", *Democratization*, **12**(4): 439-460.

Scott, James M., and Carie A. Steele, 2011. "Sponsoring democracy: The United States and democracy aid to the developing world, 1988–2001", *International Studies Quarterly*, **55**(1): 47-69.

Scott, James M., and Ralph G. Carter, 2015. "From Cold War to Arab Spring: mapping the effects of paradigm shifts on the nature and dynamics of US democracy assistance to the Middle East and North Africa", *Democratization* **22**(4): 738-763.

Scott, James M., and Ralph G. Carter, 2016 "Promoting democracy in Latin America: foreign policy change and US democracy assistance, 1975–2010", *Third World Quarterly*, **37**(2): 299-320.

Shleifer, Andrei, (2009). Peter Bauer and the failure of foreign aid. *Cato Journal*, **29**(3): 379-390.

Von Hippel, Karin, 1995. Democratisation as foreign policy: The case of Haiti. *The World Today*, **51**(1): 11-14.

Lain-lain

Charles, Jacqueline, 2021. "In aftermath of Haiti's 2010 earthquake, many still face immigration uncertainty" [daring]. dalam <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article248450275.html>

Democracy Matrix, 2020. "Ranking of Countries by Quality of Democracy" [daring]. dalam <https://www.democracymatrix.com/ranking>

Freedom House, 2017. "Freedom In The World 2017" [daring]. dalam <https://freedomhouse.org/country/haiti/freedom-world/2017>

- Transparency International n.d. "Corruption Perception Index" [daring]. In <https://www.transparency.org/en/countries/haiti> [Diakses 21 Juni 2023].
- USAID, 2002. 'Haiti Activity Data Sheet, Program: Haiti, Genuinely Inclusive Democratic Governance Attained, document number 521-005,' (Washington, DC: USAID, 2002), pp. 1–2.
- US GAO, 2003. "Foreign Assistance: US Democracy Programs in Six Latin American Countries Have Yielded Modest Results."
- Yates, Caitlin, 2021. Haitian Migration through the Americas: A Decade in the Making [daring]. dalam <https://www.migrationpolicy.org/article/haitian-migration-through-americas> [Diakses 22 Juni 2023].

*Building Democracy in Latin America:
United States Foreign Aid for Haiti*